

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SEMARANG (STUDI DI SMP AL FATTAH)

Oleh :

Arief Pratama, Herbasuki Nurcahyanto, Ida Hayu D

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Education is one of the very important factor in a country. The quality of a good education can make that developed and developing countries. The quality of education can be a tool to measure the progress of the country, because education is an important actor in improving human resources. Regulation of the Minister of national education No. 75 of 2009 About National high school Exam First mention that the national examination (UN) is an activity measurement and assessment of competence of learners nationwide at the level of primary and secondary education. National examination aims to evaluate the competence of graduates nationwide on certain subjects in the subjects of science and technology. This research aims to analyze the implementation of policy and the factors that support the national exam and impede the implementation of the national examination in JUNIOR HIGH SCHOOL Al Fattah Semarang.

This research is a qualitative deksriptif research. Data done with by means of study kepustakaan, documentation and deep interview with several informer. This research also use the model implementation policy according to george edward iii, there are four factors a mutually terkait one another in mempengaruhi success and failure implementation communication, namely resources, the disposition and structure bureaucracy.

Can be concluded that implementation policy national examination in smp al fattah city semarang still find the storm. It can be seen from some of the issues found in honesty and responsibility still weak, the students (students) that still mencontek and room ujian still not optimal. Ditemukanya factor inhibitors as resources in this facility not optimal from school, so that it needs to be repaired.

Keywords: Implementation of the policy, the national examinations, Junior High Schools, education

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di suatu Negara. Kualitas pendidikan yang baik dapat membuat negara maju dan berkembang. Kualitas pendidikan bisa menjadi alat ukur kemajuan negara tersebut, karena pendidikan merupakan aktor penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor kebijakan Ujian Nasional yang mendukung dan menghambat implementasi Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara yang mendalam dengan sejumlah informan. Penelitian ini juga menggunakan model implementasi kebijakan menurut George Edward III, ada empat faktor yang saling terkait satu sama lain dalam mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang masih belum berjalan dengan optimal, Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ditemukan seperti pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab masih lemah, kelulusan siswa belum mencapai 100% serta pada saat ujian berlangsung peserta ujian (siswa) masih mencontek dan ruangan ujian masih belum optimal. Ditemukanya faktor penghambat seperti sumberdaya dalam hal ini fasilitas yang belum optimal dari sekolah, sehingga hal tersebut perlu diperbaiki.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Ujian Nasional, SMP, Pendidikan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting di suatu Negara. Kualitas pendidikan yang baik dapat membuat negara maju dan berkembang. Kualitas pendidikan bisa menjadi alat ukur kemajuan negara tersebut, karena pendidikan merupakan masalah utama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia. Apabila suatu Negara ingin maju, maka Sumber Daya Manusia harus berkualitas, dan untuk menjadikan Sumber Daya Manusia di Indonesia berkualitas maka pendidikan di

negara ini juga harus baik. Oleh karena itu, pendidikan yang baik sudah menjadi salah satu tujuan Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam UUD 1945. Pendidikan yang bermutu sering dipandang sebagai suatu kegiatan yang sangat penting untuk melakukan perubahan dan perkembangan demi masa depan. Pendidikan yang baik dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu pula, hal ini merupakan tujuan dari pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan

menciptakan SDM yang berkualitas dengan meluncurkan berbagai kebijakan salah satunya kebijakan Ujian nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hasil UN juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- 1) Pemetaan mutu satuan dan program pendidikan.
- 2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- 3) Penentuan kelulusan peserta didik program atau satuan pendidikan.
- 4) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Implementasi kebijakan Ujian Nasional berpedoman kepada Prosedur Operasi Standar (POS) yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan dasar regulasi beracuan kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama.

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki 170 SMP yang terdiri dari 41 SMP Negeri dan 129 SMP Swasta jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan SMA yang ada di Kota Semarang, terdapat 73 SMA di Kota Semarang yang terdiri dari 16 SMA Negeri 57 SMA Swasta serta terdapat 73 SMK terdiri dari 11 SMK Negeri dan 62 SMK Swasta. Data dari Dinas Pendidikan mengenai Kelulusan Ujian Nasional ditingkat SMP selama 2 tahun belakangan ini terhitung dari 2010/2011, 2011/2012 mengalami perbedaan yang signifikan antara SMP Negeri dengan SMP Swasta. Melihat dari banyaknya Jumlah SMP yang ada di Kota

Semarang membuat Penulis tertarik mengamati pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat satuan pendidikan SMP di bandingkan SMA karena menurut data dari Dinas Pendidikan pada tahun 2010 dan 2011 tingkat kelulusan SMP lebih rendah dibandingkan SMA. Sebanyak 274 siswa yang tidak lulus pada tahun ajaran 2010/2011 sedangkan pada tahun ajaran 2011/2012 tingkat kelulusan menurun menjadi 104 siswa di seluruh SMP di Kota Semarang. SMA pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 15 siswa yang tidak lulus UN dan menurun menjadi 14 pada tahun selanjutnya. Hasil nilai kelulusan UN SMP bisa digunakan untuk masuk SMA dan SMK, sedangkan nilai kelulusan SMA kurang dilihat ketika masuk perguruan tinggi negeri karena harus mengikuti tes terlebih dahulu, sedangkan SMK dipersiapkan untuk bekerja setelah lulus.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dapat dilihat hasil Ujian Nasional selama dua tahun terakhir di SMP Al Fattah bahwa pada tahun pelajaran 2010/2011 dari 129 siswa yang mengikuti ujian terdapat 9 siswa yang tidak lulus Ujian Sedangkan pada tahun pelajaran 2011/2012 dari 106 siswa yang terdapat mengikuti ujian terdapat 9 siswa yang tidak lulus sama halnya dengan tahun sebelumnya namun pada tahun 2011/2012 ini jumlah peserta yang terdaftar menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang.

C. Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-

undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (dalam Winarno, 2008:144).

Implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor dalam menjalankan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil. Sehingga implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu kebijakan karena dalam implementasi suatu tindakan dari suatu kebijakan atau kegiatan ditransmisikan oleh pemerintah dalam masyarakat guna merealisasikan tujuan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Model-model Implementasi teori George C. Edward III

Implementasi dapat dimulai dari sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edward III ada empat faktor penting dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), Sikap (*Dispositions atau Attitudes*) dan Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*) (Nugroho, 2011:636).

Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Dalam pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi atau masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung

dengan lingkungan dan orang lain. Diperlukan adanya komunikasi yang baik dari setiap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

2. Sumberdaya

Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur dalam kehidupan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Tanpa adanya ketersediaan sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kebijakan Ujian Nasional

Pendidikan itu sendiri merupakan proses pembentukan mendasar secara intelektual dan emosional yang merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kualitas manusia yang berguna dan bermutu untuk kemajuan bangsa dan Negara. Pendidikan yang bermutu adalah suatu kegiatan yang

secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas belajarnya dengan baik kepada siswa sehingga timbul interaksi dari keduanya agar tercapai cita-cita yang diharapkan dan ini berlangsung terus menerus. (<http://erlanmuliadi.blogspot.com/2011/05/analisis-kebijakan-pelaksanaan-ujian.html> diunduh pada 27 Mei 2012 pukul 22.00).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hasil UN juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

1. Pemetaan mutu satuan dan program pendidikan.
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
3. Penentuan kelulusan peserta didik program atau satuan pendidikan.
4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Ujian Nasional, pasal-pasal terkait dalam penyelenggaraan UN yang berpedoman kepada Badan Standar Nasional Pendidikan seperti :

Pasal 11 “UN diselenggarakan oleh BSNP yang pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan”.

Pasal 12 ayat 1 menyatakan : “(1) Dalam penyelenggaraan UN, Menteri bertanggung jawab untuk: (a) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada sekolah Indonesia di luar negeri (b) menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan UN (c) menyediakan blangko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) serta (d) memantau, mengevaluasi, dan menetapkan program tindak lanjut”.

Pasal 14 ayat 3 “Peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK mengikuti ujian di satuan pendidikan penyelenggara UN”.

Pasal 15 ayat 2 “Pengawas ruang UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan dengan sistem silang murni antar sekolah/madrasah”.

Pasal 23 menyatakan :

“(1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.

(2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan tidak lulus”.

Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Penyelenggaraan UN, BSNP melakukan kontrak kerja (MoU) dengan Gubernur, perguruan tinggi negeri, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan

provinsi/kab/kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. BSNP sebagai Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama.

D. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

b) Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan Ujian Nasional di SMP Al Fattah Kota Semarang. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan kota Semarang dan SMP Al Fattah.

c) Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan teks/tulisan, kata-kata tertulis, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

d) Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu Data primer dan Data sekunder.

e) Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara mendalam, dokumentasi, studi pustaka dan Triangulasi

f) Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan dan verifikasi.

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan UN di SMP Kota Semarang (SMP Al-Fattah).

Berdasarkan hasil di lapangan melihat dengan POS yang ada, terkait pelaksanaan Ujian Nasional dapat dianalisis bahwa Pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional di Kota Semarang (Studi di SMP Al Fattah) penting untuk dilakukan sebagai kelulusan siswa sekaligus penilaian mutu pendidikan, Manfaat lain yang bisa dirasakan bahwa guru dan siswa dapat bekerjasama serta saling mengerti satu sama lain. Kepala sekolah SMP Al Fattah tidak menyetujui bahwa UN dijadikan kelulusan siswa seharusnya hanya dijadikan pemetaan saja kelulusan tetap di pihak sekolah, karena kebijakan Ujian nasional ini merupakan kebijakan yang multitafsir. Permen Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 Tentang Ujian Nasional pasal 3 menyebutkan "Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (a) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan (b) Dasar pemilihan masuk peringkat pendidikan berikutnya (c) Penentuan kelulusan peserta didik pada program dan/atau satuan pendidikan dan (d) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

A. Penyelenggaraan Ujian Nasional

1. Sosialisasi

Berdasarkan hasil di lapangan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada tiap-tiap sekolah sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan umumnya dilakukan dalam suatu kebijakan, Sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan rutin yang dilakukan dinas kepada sekolah dengan cara memanggil semua kepala sekolah dan guru sebagai perwakilan tiap-tiap sekolah biasanya pertemuan tersebut dilakukan sebanyak 4-5 kali sebelum

ujian dilakukan agar sekolah dapat mengetahui informasi yang ada dan sekolah dapat menerapkan materi yang telah diberikan dalam mengajar dan mendidik siswanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rutinya sosialisasi yang dilakukan dinas kepada sekolah, dengan sosialisasi yang baik dapat memahami sekolah dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Semarang.

2. Menerapkan Prinsip Kejujuran dan Tanggung Jawab

Berdasarkan penelitian yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa pada tahap kejujuran dan tanggung jawab masih lemah hal ini dikarenakan masih adanya pihak yang tidak jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Bentuk Ketidak jujuran ini dilakukan dengan cara. Masalah ini yang menurut penulis terus terjadi pada saat UN berlangsung, dimana selalu ada jawaban dari pihak luar untuk mendorong siswa melakukan perbuatan yang tidak jujur dan bertanggung jawab. regulasi terkait menyatakan bahwa perorangan atau lembaga dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancara pelaksanaan UN lebih jelas dalam POS yang berlaku bahwa setiap penyelenggara wajib menjaga prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Ujian nasional ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahap kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional belum berjalan dengan baik.

3. Menjaga Kerahasiaan Dokumen dan Keamanan Penyelenggaraan UN

Pelaksanaan Ujian Nasional salah satunya adalah menjaga kerahasiaan dokumen dan keamanan UN, hal ini

dilakukan agar pelaksanaan UN dapat berjalan secara rahasia. Berdasarkan hasil yang di dapat di lapangan dapat disimpulkan kerahasiaan dokumen yang dilakukan dinas kepada sekolah telah berjalan cukup baik sesuai dengan prosedur, adanya penjagaan ketat terhadap kerahasiaan naskah soal dan keamanan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional, tidak bisa sembarangan orang untuk mengetahui dan mengecek keadaan naskah soal yang akan dibagikan pada hari UN hanya dinas dan panitia terpilih saja yang dapat ikut melakukan pengecekan dan aparat pun berjaga-jaga demi keamanan. Penjagaan yang dilakukan di Kota Semarang sudah cukup bagus dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan soal sehingga sepertinya sulit sekali untuk orang lain melakukan tindakan yang tidak jujur dan bertanggung jawab seperti membocorkan soal, yang menjadi pertanyaan bagaimana orang yang bertanggung jawab bisa memberikan kunci jawaban melihat ketatnya penjagaan yang telah dilakukan. Diharapkan dari semakin ketatnya penjagaan dalam pelaksanaan UN.

4. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UN

Pada Tahap pemantauan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berdasarkan bahwa kegiatan pemantauan selalu dilakukan, tujuannya agar dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Pemantauan ini tidak hanya melihat nilai ujian siswa saja akan tetapi seluruh pelaksanaannya dari mulai pendistribusian soal, keamanan naskah soal, sikap kejujuran dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta kemampuan siswa itu sendiri agar dapat menilai dan melihat dimana letak kekurangan yang harus di perbaiki.

B. Peserta Ujian Nasional

Berdasarkan hasil yang di dapat di lapangan mengenai peserta didik (siswa) dalam pelaksanaan UN nasional dapat diketahui dalam memberikan pembekalan kepada siswa untuk menghadapi Ujian Nasional upaya dari dinas, sekolah, kepala sekolah dan guru dengan membuat beberapa program-program untuk meningkatkan kemampuan siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peserta ujian nasional (siswa) belum berjalan dengan dengan jujur, hal ini dikarenakan masih terdapat siswa yang melakukan kecurangan pada saat UN berlangsung (ketidak jujuran). Bentuk ketidak jujuran yang dilakukan dengan cara mencontek dan memberikan jawaban kepada siswa lain melalui sms ataupun selebaran kertas, karena dalam regulasi yang terkait nyatakan bahwa siswa wajib menjaga kejujuran pada pelaksanaan UN berlangsung dan peserta kelas 3 mengikuti ujian di satuan pendidikan.

C. Ruang Ujian Nasional

Tahap selanjutnya pelaksanaan Ujian Nasional adalah ruangan untuk peserta ujian (siswa), Ruang yang akan dipergunakan sebagai ujian siswa butuh diperhatikan agar pada saat ujian siswa merasa nyaman. kapasitas yang dibutuhkan harus bisa menampung peserta ujian maksimal 20 siswa dan 2 untuk pengawas ujian perkelas. Jarak yang dibutuhkan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya minimal 1 meter kiri kanan dan depan belakang hal ini bertujuan agar siswa tidak terlalu dekat dan menghindarkan dari siswa yang ingin melihat jawaban temanya serta ventilasi dan cahaya yang ada harus bagus.

Apabila dianalisis secara keseluruhan pada tahap ini, implementasi kurang berjalan optimal justru disebabkan oleh pihak pelaksana, dikarenakan masih terdapat kurang optimal pada fasilitas seperti meja dan bangku yang banyak coretan atau tulisan serta terdapat beberapa meja yang rusak seperti bolong,

sehingga menurut penulis pada tahap ruangan ini kurang berjalan maksimal.

D. Pengawas Ruang UN

Berdasarkan hasil di lapangan mengenai pengawas ruang Ujian Nasional yang dilakukan Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada semua standar dijalankan dengan baik mulai dari pengawas adalah guru sekolah SMP yang dilakukan secara silang atau acak bukan pertukaran guru antar sekolah, penyilangan pengawas dilakukan oleh dinas yang menunjuk subrayon masing-masing daerah hal ini dilakukan agar efisiensi jarak yang ditempuh guru tidak terlalu jauh sehingga mencegah keterlambatan guru dalam mengawas. Pengawasan yang dilakukan guru pun harus sesuai dengan peraturan dimana guru yang mata pelajarannya sedang di ujikan tidak diperbolehkan menjadi pengawas untuk mencegah kecurangan yang terjadi dan tetap menjaga kerahasiaan. Pengawas juga diwajibkan membacakan peraturan tata tertib sebelum memberikan soal kepada siswa, tata tertib yang dimaksud seperti membacakan peraturan dalam pelaksanaan UN kepada siswa agar siswa paham terhadap peraturan yang ada pengawas juga wajib memberikan peringatan dan sanksi jika ada peserta yang melakukan kecurangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan UN di Kota Semarang Menurut Teori George C. Edwards III.

1. Komunikasi

George Erwards III (Agustino, 2006:150) menyatakan kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana haruslah jelas dan tidak membingungkan masyarakat. Ketidakjelasan program tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan

kebijakan. Tetapi pada tataran lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh program yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan Ujian Nasional di SMP Al Fattah sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan indikator yang terdapat dalam komunikasi seperti transmisi, kejelasan dan konsistensi berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan UN di Kota Semarang dalam melakukan komunikasi kepada kepala sekolah dan guru sudah jelas dan dilakukan secara komitmen. Informasi dari pusat ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada setiap sekolah SMP sekota Semarang sudah dilaksanakan baik sesuai dengan SOP yang ada.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil analisis penulis yang disimpulkan melalui wawancara dan hasil pengamatan di lapangan mengenai sumberdaya dan fasilitas yang ada di Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Al Fattah dalam pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional dapat disimpulkan sudah berjalan cukup baik. Sumberdaya yang melaksanakan kebijakan (*staff*) yang menangani implementasi kebijakan Ujian Nasional bentuk kepanitiaan sudah memahami secara kualitas dan kuantitas. Jumlah sumberdaya yang ada sudah terpenuhi semua pegawai yang ada di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dimana tidak ada kekurangan dalam pendistribusian dan pengawasan. Mengenai kewenangan dari dinas melakukan pelaksanaan UN secara jujur berintegritas, lancar dan aman. Begitu juga dengan fasilitas yang ada di dinas semua sudah cukup memadai yang dibutuhkan seperti ruang sekretarian untuk menyimpan naskah soal dan

Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) kemudian ruang panitia untuk menerima pengawas.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, disposisi atau sikap dan komitmen yang dilakukan aparat dari berbagai pihak dapat disimpulkan komitmen dan sikap yang dimiliki para aparat Dinas Pendidikan Kota Semarang secara keseluruhan sudah baik, karena setiap pegawai sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya (Tugas, pokok dan fungsi) maka tidak terjadi suatu tunpang tindih tugas. Disposisi aparat pelaksana sudah dirasakan oleh SMP Al Fattah terlihat dari rutinya dinas mengadakan pertemuan untuk mensosialisasikan SOP mengenai pelaksanaan UN, informasi yang disampaikan berupa materi dan penugasan kepanitiaan. Komitmen dan sikap yang dilakukan aparat dengan serius karena menyangkut masa depan siswa, dimana komitmen dan sikap dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mengurus kebijakan Ujian Nasional ini sehingga masing-masing individu dalam melaksanakan kebijakan yang sedang berjalan dilakukan dengan tanggungjawab.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap yang diambil aparat dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, semua aparat baik dinas maupun sekolah sudah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan itu berlangsung.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait SOP. Dinas pendidikan sudah berjalan cukup baik semua pelaksanaan sudah berpedoman kepada SOP yang

berlaku yaitu BSNP. Standar Operasi Prosedur (SOP) tersebut menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dan melakukan semua tugas yang ada, dengan demikian struktur birokrasi dari sebuah kebijakan haruslah diperhatikan agar para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, jika pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mengikuti SOP yang ada maka pelaksanaan dapat tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang terlalu kompleks membutuhkan kerjasama yang banyak orang. Aparat sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik yang berpedoman kepada SOP yang diberlakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada struktur birokrasi sudah berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan pemahaman mengenai SOP sebagai pedoman yang berlaku sudah dijalankan dengan baik pada kebijakan Ujian Nasional di Kota Semarang.

F. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan UN di SMP Kota Semarang (Studi di SMP Al Fattah).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan UN pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab masih belum berjalan dengan baik dalam pendistribusian soal sehingga beredarnya kunci jawaban kepada siswa.
- b. Peserta Ujian Nasional Masih mengalami kendala dimana terdapat siswa yang tidak lulus Ujian Nasional dan masih terdapat siswa yang mencontek atau menanyakan jawaban pada saat ujian berlangsung

menandakan masih terkendalanya pelaksanaan UN di Kota Semarang.

- c. Ruangan ujian masih belum optimal, karena masih terdapat kerusakan serta coretan pada meja dan bangku dan kurangnya lab sebagai penunjang pembelajaran siswa di SMP Al Fattah.

2. Faktor-Faktor Pendukung maupun penghambat Implementasi Kebijakan Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang (SMP Al Fattah).

Faktor Penghambat

a. Sumberdaya

Fasilitas yang ada di sekolah masih kurang menunjang dari segi lab, meja dan bangku pada saat proses pembelajaran dan ujian berlangsung.

Faktor Pendukung

a. Komunikasi

Komunikasi rutin yang dilakukan aparat pelaksana dengan pihak sekolah merupakan bentuk komunikasi yang baik. sehingga apabila ada keluhan dan saran pertemuan ini bisa menjadi media pembahasan sebagai masukan.

b. Sumberdaya

Staf dan fasilitas yang dimiliki Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah SMP Al Fattah sudah cukup terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang ada pun sudah tersedia transportasi juga disediakan untuk kebutuhan pendistribusian naskah soal.

c. Disposisi

Komitmen aparat pelaksana terlihat dengan pertemuan yang dilakukan secara rutin, pegawai yang bekerja sudah sesuai dengan tupoksinya (Tugas, pokok dan fungsi) serta ramah dalam melayani masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Semua pelaksanaan yang dilakukan aparat dalam pelaksanaan kebijakan Ujian

Nasional beracuan pada Prosedur Operasi Standar (POS) yang ada.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Dinas Pendidikan pada pelaksanaan UN harus tegas dalam memberikan sanksi peringatan baik berupa tulisan maupun lisan atau sanksi yang berupa efek jera kepada pelanggar setiap pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan seperti kecurangan pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang masih terjadi.
2. Peserta didik (siswa) harus mempunyai tanggung jawab dan kejujuran serta percaya diri pada saat ujian berlangsung, agar kejadian seperti mencontek tidak terjadi lagi. Dalam hal ini kepala sekolah dan guru mempunyai peran penting dalam memupuk rasa kejujuran dan tanggung jawab siswa.
3. Ruangan harus dilakukan pembenahan dan perbaikan dengan mengganti fasilitas yang sudah rusak dengan yang baru sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
4. Fasilitas yang masih belum berjalan secara optimal di SMP Al Fattah harus diperbaiki, seperti meja dan bangku agar dalam pelaksanaan UN dapat berjalan secara optimal dan tidak mengganggu kenyamanan peserta.

G. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Mulyana, Deddy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu*

Sosial. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi kebijakan publik (transformasi pikiran)*. Yogyakarta: Lukan Offset.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta : Media Presindo

Non Buku :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama menyebutkan

<http://www.kemdikud.go.id/kemdikbud>

<http://www.disdik.semarangkota.go.id>

<http://belajarpsikologi.com>

<http://erlanmuliadi.blogspot.com>